

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang didapatkan oleh penulis terkait problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH. Maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan penting mengenai judul skripsi “Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (Studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)” adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan) didalam Petunjuk teknis graduasi terdapat 4 (empat) kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembagian dana PKH yaitu:
  - a. Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan
  - b. Pengusulan Nama Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - c. Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu
  - d. Labelisasi
2. Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan), terkait problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH ada 4 hal yaitu:

- a. Frekuensi musyawarah desa sangat minim.
- b. Tidak maksimalnya komunikasi antar aparat pemerintah desa.
- c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa.
- d. Kurangnya pemahaman pemerintah desa.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penulis masih kesulitan untuk menggali informasi dari kepala desa terkait tugas dan wewenangnya dalam penetapan penerima dana PKH dikarenakan pada saat wawancara berlangsung kepala desa tidak selalu berada di tempat serta kurangnya pemahaman kepala desa terkait tugasnya dalam pembagian dana PKH.
2. Penulis kesulitan untuk menggali informasi dari pendamping PKH terkait pembagian dana PKH dikarenakan pendamping PKH sulit untuk ditemui karena banyak kegiatannya, serta kediaman pendamping PKH jauh dari desa Sumber Jaya.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan dapat disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan “Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan). Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis menyarankan kepada kepala Desa Sumber Jaya untuk lebih memahami terkait kewenangannya dalam pembagian dana bantuan PKH agar dapat mengawasi proses pembagian dana bantuan PKH secara lebih teliti dan sesuai dengan aturan yang ada agar dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
2. Penulis menyarankan kepada kepala Desa Sumber Jaya agar lebih bekerja sama dengan pendamping PKH untuk kelancaran program tersebut, serta lebih adil dalam mengambil kebijakan agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

